

PENGARUH THAKSIN SHINAWATRA DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI THAILAND

Danra Fatimah¹
Nim. 1302045051

Abstract

The ultimate aims of this thesis is to provide the elite politics in Thailand who have great influences in terms of establishing Democratization system, especially in era of Thaksin Shinawatra when he was being prime minister of Thailand in the year of 2001. in terms of research methodology, firstly, the thesis type is Descriptive, secondly the related with the data resources, this thesis is using secondary data which obtain from literature reviews, journals, books and other related resources. Lastly the data analyze is kualitative descriptive. The result shows that Thaksin Sinawatra become the most powerful man in creating the democratization system in Thailand. Through the Elite theory, it can be showed that Thaksin received huge respects and trusts from the citizen of Thailand, especially people from rural area in North and South Thailand. In addition, Thaksin become the Prime Minister who aware and care about the marginal people, as a result he loved by most citizen of Thailand, and proven that he has elected as the prime minister for the second time. In addition related with Democracy theory, Thaksin has successfully provide the establishment of freedom to society in terms of free of speech, and united. Although he has brought several good aspects about democracy, yet he still received critics from his political opponents. Therefore by the year of 2006 Thaksin coupled by the military. In the year of 2011, his little sister Yingluck elected as the Prime Minister until 2014, and she inherit democracy system from his older brother.

Keywords: *Thaksin Shinawtra, Elite Politic, Democratization, Thaiand*

Pendahuluan

Demokrasi merupakan tatanan pemerintahan yang hingga saat ini dipandang sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan yang terbaik bagi setiap masyarakat di hampir seluruh belahan dunia. Pemerintah di negara manapun berusaha meyakinkan dunia internasional bahwa mereka menganut sistem politik demokratis, atau sekurang-kurangnya tengah berproses ke arah itu dan Thailand merupakan salah satu negara yang sedang dalam proses demokrasi tersebut. Dimulai pada tahun 1932, ini adalah momen kudeta yang berdarah. Peristiwa yang juga dikenal sebagai revolusi Siam tersebut adalah momen titik balik dalam sejarah Thailand. Aksi ini membuat sistem monarki absolut tidak berlaku lagi yang membuat Thailand hingga kini menjadi negara yang menerapkan sistem monarki konstitusional.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

Kudeta pertama ini dipelopori oleh kaum militer dan sipil yang didorong kuat oleh rasa ketidakpuasan rakyat atas proses penyelenggaraan negara dibawah kekuasaan Dinasti Chakri yang telah melakukan reformasi besar-besaran di sektor keuangan dan administrasi yang justru menghadirkan dominasi dan kekuasaan negara beserta perangkat state apparatus-nya atas rakyat Thailand. Keadaan ini menyulut aksi kelompok militer Thailand yang mengatasnamakan ketidakpuasan masyarakat sipil untuk melakukan gerakan perlawanan meruntuhkan rezim yang berkuasa yang disebut dengan kudeta.

Pasca terjadinya kudeta pertama, dibentuklah pemerintahan baru dengan mengung sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan struktur pemerintahan didalamnya didominasi oleh kelompok militer. Sejak saat itu, pihak militer mengambil kontrol atas kekuasaan selama 60 tahun lamanya. Hal ini menyebabkan perpecahan antara masyarakat sipil yang pro demokrasi dan militer. Setelah itu, terjadi siklus pada setiap perubahan pemerintahan. Dimulai dengan kudeta, pemilu, periode singkat pemerintahan sipil, lalu terjadi krisis politik dan kembali lagi pada tahap kudeta. Perebutan kekuasaan dengan jalan kudeta ini selalu menjadi dinamika politik di Thailand.

Hingga pada tahun 1977 kelompok mahasiswa dan pihak sipil berhasil menjatuhkan kekuasaan junta militer. Dalam pemerintahan parlementer waktu itu memiliki tujuan untuk membangun demokrasi ditunjukkan dengan diberlakukannya konstitusi yang demokrasi, pemilihan legislatif, dan kebebasan politik, bahkan partai politik telah memiliki legitimasi. Dalam pemerintahan parlementer waktu itu memiliki tujuan untuk membangun demokrasi ditunjukkan dengan diberlakukannya konstitusi yang demokrasi, pemilihan legislatif, dan kebebasan politik, bahkan partai politik telah memiliki legitimasi. Kudeta ini terjadi akibat penindasan politik oleh pemerintah yang saat itu dikuasai oleh militer. Pemerintahan parlementer bertahan hampir 12 tahun, Namun, pihak militer kembali melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil pada Februari 1991. Hal ini disebabkan oleh Perdana Menteri Chatichai yang memerintah sejak tahun 1989 berusaha mengambil kontrol lebih atas kekuatan militer. Ketika militer menjamin kemenangan pada pemilu tahun 1992, terjadi demonstrasi yang menuntut reformasi demokratis. Raja Thailand kemudian mengambil tindakan sebagai jalan mengakhiri kekuasaan militer. Sejak saat itu, militer Thailand berusaha menjaga jarak dengan kehidupan politik. Pada tahun 1994 *Democratic Devolepment Commite* (DDC) pertama kali didirikan oleh perdana menteri Chuan Leekpai dan terjadi perubahan konstitusi yang lebih demokratis pada tahun 1997.

Pada tahun 1998, Thaksin Shinawarta mendirikan partainya sendiri yang diberi nama *Thai Rak Thai* (Rakyat Thai Mencintai Sesama Rakyat Thai) yang kemudian pada pemilihan umum 6 Januari 2001, partai tersebut akhirnya keluar sebagai pemenang dan mengangkat Thaksin menjadi PM pada 9 Februari 2001. Di bawah Pemerintahan Taksin yang terpilih sebagai PM pertama melalui pemilu terbuka berkuasa pada tahun 2001, Thailand memiliki Demokrasi yang berkembang dengan kebebasan berekspresi, pers yang relatif bebas dan Masyarakat Sipil yang aktif, di mana gerakan sosial berkampanye untuk melindungi kepentingan orang miskin. Pada tanggal 19

September 2006, tentara Thailand menggelar sebuah kudeta menggulingkan Pemerintah terpilih Thaksin Shinawarta. Jatuhnya kepemimpinan Thaksin menyebabkan masyarakat terbagi dalam dua kubu (pro dan kontra) yaitu kubu yang mendukung pemerintahan Thaksin atau pro-demokrasi yang disebut kubu kaos merah serta kubu yang kontra yaitu pihak militer atau elit politik yang disebut kaos kuning.

Perjuangan yang dilakukan Thaksin dalam memperjuangkan demokrasi secara keseluruhan tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti, untuk melihat lebih dalam bagaimana pemerintahan Thaksin dalam memperjuangkan proses demokrasi di Thailand.

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh Thaksin Shinawatra dalam proses demokratisasi di Thailand.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Elit Politik

Teori elit menyatakan bahwa setiap masyarakat, terbagi dalam dua kategori yang luas mencakup:

1. Sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah.
2. Sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.

Dalam kajian terhadap perilaku politik yang menggunakan unit analisis individu sebagai aktor politik meliputi kategori individu sebagai aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warganegara biasa. Berikut adalah empat faktor yang memberikan pengaruh terhadap perilaku politik seorang aktor politik:

1. Lingkungan sosial politik langsung, seperti sistem politik, hukum, ekonomi, budaya dan media massa.
2. Lingkungan sosial politik langsung mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor; seperti keluarga, agama, kelompok pergaulan dan sekolah.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu
4. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi.

Teori Elit ini juga digunakan penulis sebagai acuan dalam menjelaskan peranan Thaksin sebagai elit politik dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan terhadap hal atau kondisi tertentu.

Teori Demokrasi

Istilah demokrasi sering diartikan sebagai pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Sedangkan untuk menuju sistem politik yang Demokratis suatu Negara akan melalui tahap menuju demokrasi yaitu demokratisasi. Demokratisasi merupakan sebuah proses untuk mencapai sistem pemerintahan yang demokratis, yang didasarkan pada nilai-nilai maupun indikator-indikator tertentu. Oleh karena merupakan sebuah proses, sebuah tindakan tertentu yang dilakukan oleh, baik pemerintah maupun masyarakat, bisa menjadi sangat berpengaruh terhadap prospek demokratisasi di dalam suatu negara. Prospek tersebut

dapat berupa semakin kuatnya tendensi suatu negara untuk mencapai sistem pemerintahan yang demokratis.

Agar mencapai demokrasi yang ideal suatu negara diperlukan untuk memenuhi serta mengimplementasikan semua kriteria, prinsip, nilai, dan elemen-elemen demokrasi. Itulah pijakan mekanisme kekuasaan dalam konsepsi demokrasi, yang mendasarkan pada persamaan hak antar sesama warga negara yang dimana konsepsi demokrasi adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama rakyat yakni, kesejahteraan dan ketertiban umum. Mengutip teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian pada akhirnya bermaksud menggambarkan sesuatu yang lebih mendetail mengenai pengaruh elit politik Thaksin dalam demokratisasi di Thailand.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada buku buku ataupun jurnal jurnal, dan website website yang terkait dengan penelitian ini. Dalam artian literatur yang mempunyai keterpautan dengan konsepsi teori elit dan demokrasi. penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa kualitatif. Dalam konteks ini seorang pemimpin dapat berpengaruh dalam perubahan sistem pemerintahan suatu negara. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan politik yang mengacu pada proses demokrasi di Thailand.

Hasil Penelitian

jelas dengan slogan „*Think new, act new, for every Thai*“ membawa Thailand menuju kesejahteraan, dengan landasan menjunjung tinggi kepentingan rakyat, Ia membuat kebijakan *Pro Poor Policies* yang berfokus pada perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin di Thailand. Peningkatkan perekonomian dan kesejahteraan seperti yang disebutkan dalam paragraf pertama bahwasanya ini merupakan salah satu indikator jalan Thailand menuju kearah yang demokrasi.

Seperti kenaikan upah minimum, kartu kredit untuk petani dan komputer tablet untuk anak-anak sekolah merupakan kebijakan yang dijalankan Thaksin untuk pembangunan manusia dan dalam hal memajukan ilmu pengetahuan sebagai salah satu kriteria dalam nilai-nilai demokrasi. Elemen lain yang dapat dilihat dalam terwujudnya demokrasi disuatu negara dapat ditunjukkan dengan kebebasan masyarakatnya dalam hal untuk menyatakan pendapat , pers dan media. Pada awal masa jabatan keduanya Janji yang dibuat oleh Thaksin bahwa dia akan menghormati demokrasi kebebasan dan pers.

Penyelesaian masalah baik yang dikritisi oleh media dalam pemberantasan obat-obat terlarang dan kerusuhan Muslim di selatan memang banyak menjadi sorotan publik, Thaksin dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tangguh, Sebagai contoh, dia pernah mengatakan: "Saya masih bisa membawa pistol dan menarik pelatuknya. Sebelum saya mati saya ingin membunuh musuh kita terlebih dahulu, dan ini adalah kemiskinan, obat-obatan terlarang dan korup". Meskipun ia menjunjung tinggi

kebebasan akan tetapi saat mengambil keputusan faktor-faktor kepemimpinan aktor elit politik dapat dipengaruhi lingkungan, keluarga maupun sekolah. Thaksin merupakan mantan perwira polisi sebelum terjun ke dunia politik. Dalam kasus-kasus di atas dapat dilihat bahwa pada masa kepemimpinan Thaksin media dapat bebas memberikan aspirasi bahkan kritik terhadap pemerintahan Thaksin.

Meskipun kepemimpinan Thaksin sebagai PM berhenti di tahun 2006 akan tetapi pengaruhnya masih berlanjut, di tahun 2011 rezim Thaksin muncul kembali yakni kemenangan Yingluck Shinawatra dari Partai Pheu Thai pada 3 Juli setelah mendapatkan mayoritas 296 kursi dan merebut kembali kekuasaan dari oposisi Partai Demokrat. Dia melanjutkan perjuangan Thaksin untuk menjalankan kebijakan populis yang populer di kalangan menengah kebawah. Yingluck memimpin hampir lima tahun setelah kakaknya Thaksin digulingkan dalam sebuah kudeta militer. Ia digulingkan karena dituduh menyalahgunakan kekuasaan disaat Thailand masih terjebak dalam krisis politik. Kabinet segera menunjuk Niwattumrong Boonsongpaisan, wakil perdana menteri, menggantikan Yingluck. Pengadilan yang berperan penting menurunkan pemerintahan Shinawatra dalam tahun-tahun bergejolak sebelumnya, secara aklamasi memutuskan bahwa Yingluck bertindak melawan hukum saat mengganti pejabat keamanan penting negara itu pada 2011.

Kemunculan kaos merah dan kuning

Dengan basis dukungan politik didasarkan pada mayoritas miskin pedesaan Thailand, Thaksin merebut kekuasaan dan bersaing dengan elit bisnis dan elit militer. Thaksin menggunakan massa dengan popularitasnya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menempatkan jaringan pribadinya ke posisi-posisi kunci di pemerintah. Kebangkitan garis keturunan elit militer tua ini adalah reaksi yang jelas dan tantangan untuk kekuasaan Thaksin yang tumbuh di militer. Kompetisi ini tumbuh antara Thaksin dan elit militer tradisional yang akan memainkan peran utama dalam kejatuhan Thaksin, sebagai General Prem, General Saprang dan Jenderal Sonthi semua akan menjadi anggota terkemuka dari junta militer yang akan menyingkirkan Thaksin pada tahun 2006.

Secara tidak sengaja Thaksin menciptakan tidak hanya kalangan elit militer tua, tetapi juga elit bisnis baru. Karena ketidakpuasan elit pesaingnya mulai memimpin kampanye anti-Thaksin. Misalnya, Chuwit pergi untuk mengekspos korupsi kepolisian Thaksin dan memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menimbulkan ancaman politik kepada pemerintah Thaksin. Pasca pelengseran Thaksin Shinawatra pada tahun 2006 yang kemudian memecah belah masyarakat Thailand menjadi dua kubu, kaos merah yang pro *The United front of Democracy against Dictatorship* (UDD) dan kaos kuning yang pro *People's Alliance for Democracy* (PAD). Kala itu, kudeta militer telah membuat PM Thaksin Shinawatra turun dari jabatannya. Meskipun melalui kudeta rotasi kekuasaan tetap berjalan, Kaos merah adalah kubu pro Thaksin. Kaos merah sudah melancarkan aksi demonya sejak dikudetanya Thaksin tahun 2006 lalu.

Kaos Kuning merupakan pesaing Demonstran kaos merah di Thailand. Jika kaos merah menuntut Pemilu segera diadakan, maka kaos kuning menuntut kaos merah menghentikan aksinya. Kelompok kaos kuning juga berjanji akan mengambil

tindakan untuk merespon aksi unjuk rasa demonstran kaos merah yang. Kelompok kaos kuning, atau Peoples' Alliance for Democracy (PAD), merupakan gerakan politik para tokoh yang terkait dengan kerajaan, pebisnis, dan kelas menengah masyarakat urban. Kaos kuning memang benar-benar menentang kelompok pro-Thaksin, National United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD), yang sebagian besar adalah rakyat pedesaan dan berasal dari masyarakat ekonomi bawah. Gelombang demonstran kaos kuning melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di jalanan ibukota Bangkok menjelang kudeta yang menjungkalkan Thaksin pada 2006, dan juga para sekutunya pada 2008.

Krisis Politik Thailand Setelah Kudeta Thaksin (2006-2014)

Setelah melacarakan kudeta damai, penguasa militer AD interim Thailand memberlakukan undang undang darurat. Termasuk membatasi kebebasan berkumpul. Media secara luas berada di bawah pengawasan militer. Terutama, pemancar televisi dilarang menayangkan pendapat para pemirsa. Belum jelas hingga kapan undang-undang ini akan diberlakukan.

1. Krisis Politik 2008-2009

Konflik antara People Alliance for Democracy (PAD) dan People's Power Party (PPP), Partai Perdana Menteri "Samak Sundaravej" dan Somchai Wongsawat dan kemudian disusul dengan National United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) dan Partai Demokrat, PM Abhisit Vejjajiva. Konflik ini merupakan konflik lanjutan dari taun 2005-2006, dimana PAD memprotes partai Thai Rak Thai (TRT), PM Thaksin Sinawatra. Pengikut PAD biasanya berpakaian kuning, sehingga disebut "Kaos Kuning", sebagai warna kehormatan untuk Raja Bhumibol Adulyadej. Sedangkan pengikut UUD berpakaian merah, sehingga disebut "Kaos Merah", yang dikenal sebagai pendukung PM Thaksin Sinawatra .

2. Krisis Politik 2013

Konflik yang menyelimuti Thailand selama tiga bulan berjalan telah menelan korban 23 orang dan lainnya 800 orang mengalami cedera. Masa anti pemerintah pimpinan Sithep Thaugshuban adalah menuntut Yingluck turun karena dianggap boneka dari Thaksin. Hal itu dilatarbelakangi karena Yingluck Shinawatra adalah adik kandung Thaksin Shinawatra, PM yang telah tersingkir. Pada saat itu, Yingluck menolak lengser, akhirnya Desember 2013 seluruh anggota parlemen oposisi mundur.

3. Sistem Demokrasi Thailand hingga 2014

Saat ini Thailand dipimpin oleh Pemimpin Junta Militer, Prayuth Chan Ocha. Pemimpin junta militer ini terpilih menjadi perdana menteri dalam sidang parlemen bulan Mei 2014 lalu. Jenderal Prayuth memenangkan lebih dari setengah suara anggota parlemen dan ia adalah satu-satunya kandidat. Hal ini sama sekali tidak mengagetkan lantaran kemenangannya sudah diramalkan sejak ia merebut kekuasaan pada Mei 2014. Dimana ia bersihkeras memimpin pasukan militer untuk menghentikan aksi protes selama 6 bulan yang tidak berkesudahan.

Jenderal Prayuth mengatakan untuk menstabilkan dinamika politik Thailand diperlukan 3 fase. Fase pertama selama 3 bulan akan fokus pada rekonsiliasi, fase kedua yaitu membuat rancangan konstitusi dan kabinet yang membutuhkan waktu

setahun penuh. Setelah dua fase tersebut selesai, pemilu baru bisa diselenggarakan. Dan fase yang ketiga adalah pemilu di bawah sistem demokrasi yang absolut dan bisa diterima dua pihak serta segala aspek hukum akan dimodernisasi. Jenderal Prayuth pun tidak lupa memperingatkan jika protes berlanjut, dia tidak akan mempunyai pilihan lain selain menurunkan pasukan. Penurunan pasukan tersebut sudah dilakukan di Bangkok, hampir 6000 pasukan dan kendaraan tempur disiagakan di ibukota untuk menghadang protes.

Sejak itulah, saat ini negara dikelola oleh junta militer bernama Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Keamanan. Dewan itu bersikeras mereka adalah pemain netral di antara faksi-faksi politik yang saling berseberangan. Sebelumnya, Jenderal Prayuth Chan-ocha menjanjikan akan kembali ke sistem demokrasi. Hanya saja Pemilu baru akan terjadi pada Oktober 2015. Ia juga mengatakan Pemilu akan berlangsung di bawah konstitusi baru yang akan dibuat oleh sebuah badan khusus.

Menurut teori elit Di dalam kelompok penguasa (the rulling class) selain ada elit yang berkuasa (the rulling elite), juga ada elit tandingan, yang mampu meraih kekuasaan melalui massa jika elit yang berkuasa kehilangan kemampuannya untuk memerintah. Dengan demikian rotasi kekuasaan tetap berjalan bahkan jika dilakukan dengan kudeta tetap secara damai dan segera dilakukan pemilu untuk menentukan kepemimpinan selanjutnya.

Selain krisis politik yang terjadi pasca kejatuhan Thaksin pada praktiknya, usaha Thaksin tersebut juga dihadapkan dengan beberapa hambatan dalam mewujudkan demokrasi diantaranya :

A. Kebebasan masyarakat dan hak politik

Selaras dengan sistem demokrasi, Thailand telah menyelenggarakan pemilu. Namun, kebijakan politik yang kontroversial dan keterlibatan hutang membuat timbulnya gejolak politik di tengah masyarakat. Gelombang protes People's Alliance Democracy (PAD), koalisi yang sejak awal gencar memprotes PM Thaksin Sinawtra yang berujung pada kudeta militer pada tahun 2006 lalu.

B. Pluralisme politik dan Partisipasi

Awalnya, Sejak Thaksin dan Partai Thai Rak Thai berkuasa pada tahun 2001, ada dua faksi politik utama dalam sistem Thailand: DP, yang saat ini terkait dengan elit tradisional, dan TRT dan penerusnya (Partai Kekuatan Rakyat dan PTP). Namun, partai politik terus diatur dalam undang-undang tahun 2007, sehingga partai politik baru tidak dapat terbentuk, dan pihak yang ada dilarang bertemu atau melakukan kegiatan politik. Larangan tersebut termasuk setiap musyawarah partai politik pada proses penyusunan konstitusi.

C. Asosiasional dan Hak Organisasi

Di bawah keadaan darurat dan rezim darurat militer, kebebasan Asosiasi dan Organisasi sangat dilarang. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya

komplotan yang berdemonstrasi lagi. Prakteknya, demonstrasi terus berlanjut sampai pengambilalihan militer.

D. Peraturan Hukum

Pengadilan Thailand telah lama memainkan peran penting dalam menentukan hasil dari sengketa politik, menghasilkan keluhan aktivisme yudisial dan bias politik, dan ini berlanjut di masa pasca kudeta. Amnesty International melaporkan pada bulan September lalu bahwa setidaknya 665 orang telah ditahan sewenang-wenang atau diperintahkan untuk melapor ke NCPO dengan alasan yang tidak jelas. Dari jumlah tersebut, 395 berafiliasi dengan PTP atau kaos merah Front Persatuan untuk Demokrasi melawan Kediktatoran (UDD), dan 141 adalah aktivis, akademisi, atau jurnalis. Kebanyakan dari mereka dan beberapa diisolasi di fasilitas militer.

E. Kebebasan Masyarakat

Enam stasiun televisi utama Thailand dan 525 frekuensi radio sangat dikontrol Pemerintah. Di bawah darurat militer pada tahun 2014, NCPO memerintahkan penghentian siaran oleh semua stasiun radio, termasuk radio komunitas, dan 14 satelit dan stasiun televisi digital; beberapa stasiun kemudian diizinkan untuk melanjutkan pemrograman tetapi dilarang untuk mencakup topik-topik politik. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif dari penyebaran informasi yang dapat menyebabkan gangguan atau yang kritis terhadap rezim kudeta. Pada bulan November, Pelayanan Publik Penyiaran dihapus setelah acara menampilkan penduduk desa dan aktivis mengkritik kudeta.

Kemudian, Fitnah adalah tindak pidana apalagi ditujukan kepada pihak kerajaan. Pada bulan Mei, tentara melancarkan gugatan pencemaran nama baik terhadap dua aktivis hak asasi manusia dengan Yayasan Lintas Budaya setelah mereka mengeluarkan surat terbuka menyerukan penyelidikan kasus dugaan penyiksaan.

F. Otonomi dan Hak Individu

Kecuali di daerah yang terkena konflik sipil, warga negara memiliki kebebasan bepergian dan pilihan tempat tinggal. Warga juga menikmati kebebasan kerja dan pendidikan tinggi. Hak atas kekayaan dan membangun bisnis yang dilindungi oleh hukum, meskipun dalam kegiatan usaha praktek dipengaruhi oleh beberapa penundaan birokrasi, dan pada kali oleh pengaruh pasukan keamanan dan kejahatan terorganisir di daerah tertentu. Sementara perempuan memiliki hak hukum yang sama dengan laki-laki, mereka tetap tunduk pada diskriminasi ekonomi dalam praktek. Namun, rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, dan perdagangan seks. Pariwisata seks telah menjadi bagian penting dari perekonomian di beberapa daerah perkotaan dan resor.

Merujuk pada Lary Diamond (2008), ada sepuluh prinsip demokrasi yaitu substantial freedom of speech; freedom of religion with ethnic and cultural participation; universal suffrage for adults, free, fair, and generally competitive elections; legal equality under transparent rule of law; an independent and neutral judiciary; due process of law for all individuals; institutional checks and balances; state acquiescence in vibrant civil society; civilian control over military and other

state institutions . Jika kita melihat kronologi politik Thailand, terutama pasca kudeta tahun 2006, dan membandingkan dengan prinsip demokrasi yang dikemukakan Lary Diamond, terutama prinsip kontrol sipil atas militer dan institusi pemerintah, maka kita mendapati situasi yang sebaliknya. Sejak kudeta tahun 2006, militer kembali masuk ke pentas politik Thailand dan memainkan perannya yang dominan. Sejak saat itu pula militer keluar dari kotak Parlemen dan PM, serta menjadi kekuatan sendiri. Dengan struktur seperti ini, Kerajaan dan Privy Council merupakan lembaga tertinggi di Thailand. Militer setingkat kedudukannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Perdana Menteri dan Kabinet Thailand, serta Peradilan dan Kehakiman.

Dalam sistem politik demokrasi, suara dan logika rakyat adalah sumber dan dasar dari setiap kebijaksanaan nasional. Bahkan ada istilah *vox populi vox dei* (suara rakyat suara tuhan). Suara dan logika rakyat (hasil pemilu) semestinya digunakan para elite politik thailand untuk mengelola proses pembuatan keputusan publik dan merekrut pemimpinnya. Pemilu di Thailand, menunjukkan kemauan rakyat Thailand tentang masa depan politik nasionalnya. Partai Pheu Thai mendapat 263 kursi dan menang atas Partai Demokrat yang hanya memperoleh 162 kursi. Dengan demikian, bila semuanya berjalan lancar, calon dari Partai Pheu Thai, Yingluck Shinawatra, akan menjadi perdana menteri, menggantikan Abhisit Vejjajiva. Kemenangan Partai Pheu Thai atas Partai Demokrat menunjukkan bahwa pendukung Thaksin Shinawatra selalu unggul atas pendukung Partai Demokrat. Ketika masih bernama Thai Rak Thai, partai Thaksin itu memang tiga kali atas Partai Demokrat, yaitu pada pemilu 2001, 2005, dan 2006. Ketika bernama People Power Party (PPP), pendukung Thaksin menang atas Partai Demokrat pada pemilu Desember 2007.

Kesimpulan

Keberhasilan Thaksin Shinawatra dalam mengupayakan sistem pemerintahan yang demokratis di Thailand dapat dilihat dari beberapa faktor utama. Pertama, upaya yang dilakukan Thaksin pada saat masa kepemimpinannya menjadi Perdana Menteri dari 2001-2006 yaitu untuk memajukan perekonomian dan mensejahterakan rayat. Hal tersebut dapat dikatakan berhasil karena dalam kebijakan "*Pro Poor Policies*" yang dijalankan Thaksin pada masa kepemimpinannya taraf kehidupan masyarakat miskin Thailand dalam bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan meningkat. Semua perkembangan dan kebijakan populis ini pada kenyataannya efektif dalam meningkatkan ekonomi pedesaan dan menstabilkan perekonomian nasional. Penghasilan di Timur Laut Thailand, merupakan wilayah termiskin, naik 46% 2001-2006. Kedua, indikator keberhasilan dalam proses demokrasi dapat dilihat dari kebebasan masyarakat berpendapat dan berpolitik. Pemilu masa kepemimpinan Thaksin merupakan pemilihan pertama yang terbuka melibatkan seluruh masyarakat Thailand. Diawal kepemimpinannya dia berjanji akan adanya keterbukaan informasi dan melindungi pers serta media dalam menjamin kebebasannya. Meskipun jika penyampaian media dianggap melanggar hukum, tetap akan mendapatkan sanksi, tapi kritik dan berita dalam pemerintahan Thaksin tetap bermunculan.

Faktor terakhir yang menjadikan Thaksin sebagai elit politik yang berpengaruh di Thailand dapat dibuktikan dengan, meskipun dia tidak lagi memimpin akan tetapi para pendukungnya yang biasa disebut dengan kaos merah masih selalu menyuarakan dukungannya terhadap demokrasi melalui kemenangan Partai Pheu Thai atas Partai

Demokrat menunjukkan bahwa pendukung Thaksin Shinawatra selalu unggul atas pendukung Partai lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

Bunbongkarn,Suchit.2004. *The Military and Democracy In Thailand*, ANU E Press
The Australian National University

Diamond, Larry.2008 *The Spirit of Democracy The Struggle to Build Free Societies
Throughout the World* : Times Books/Henry Holt & Company

Duncan, McCargo. 2002. *Reforming Thai Politic*. NIAS : Publishing Nordic Institute
of Asian Stdies

Gaffar Afan, 2005. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi* ,Yogyakarta,
Pustaka

Huntington, Samuel P. 1991. *Gelombang Demokrasi Ketiga* . Jakarta : Grafiti

Ji Ungpakorn,Giles.2010. *Thailand's Crisis and The Fight For Democracy*, WDPress

Sitepu, Anthonius P. 2012 *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu

P Pasuk and Baker C. 2009. *Thaksin Chiang Mai*: Silkworm Books.

SP.Varma. 2003. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Jurnal

Basis Susilo, Dosen Hubungan Internasional dan Dekan FISIP Universitas Airlangga
“Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi Thailand”Jurnal.Pdf.

B Uwannodan Burns Wayne.2009. *Konstitusi 1997*. Sumber dan Proses.

Universitas British Columbia Law Review 32 (2): 227-247.

Hewison Kevin.2010. *Thaksin Shinawatra and the reshaping of Thai Politics*.
Carolina Asia Center, CBM7582 FedEx Global Educaion Center, Universiry
of North Carolina, Chapel Hill NC 27599 USA

Muradi.(2005). *Pengantar Ilmu Politik; Partai-partai Politik*. Artikel: Joseph
Lapalombara dan Myron Weiner. Political Parties and Political Development.
(Princeton: Princeton University Press. 1966).

Thalhah HM. 2009, *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif
Pemikiran Hans Kelsen*, Bojonegoro, Jawa Timur, Jurnal Hukum, No. 3 Vol.
16 Juli

Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2008 Pendidikan Kewargaan (Civic Education) *DEMOKRASI, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Edisi Ketiga, ICCE UIN syarif Hidayatullah, Jakarta.

White, L. 2009. *Political Booms: Local Money and Power in Taiwan, East China, Thailand, and the Philippines*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

World Bank. (2009). from World Development Indicators Online (WDI) database.

Internet

Bangkok Thailand. 2017. National Economic and Social Development Board. http://www.nesdb.go.th/Portals/0/econo_datas/account/gpp/GPP%2019952006.zip

CFR.2018.Thailand : Democratic Failure – It’s Lessons Middle East. Diakses melalui <http://www.cfr.org/thailand/thailand-democratic-failure-its-lessons-middle-east/p24485>.

Countriesquest.2017. Struggle for Democracy http://www.countriesquest.com/asia/thailand/history/struggle_for_democracy.htm tanggal 1 Mei 2015.

Darmawan,Wahyu.2018 *MK Thailand Copot Jabatan PM Cantik Yingluck*

Shinawatra, diakses dari <http://surabaya.bisnis.com/read/20140507/25/71153/mk-thailand-copot-jabatan-pm-cantik-yingluck-shinawatra>

DW. 2018.*Kaos Merah Penuhi Jalan Bangkok*. Diakses melalui <http://www.dw.de/kaos-merah-penuhi-jalanan-bangkok/a-15963212>

Facts and Details.2018 *THAKSIN SHINAWATRA’S LATER YEARS IN POWER IN THAILAND* http://factsanddetails.com/southeast-asia/Thailand/sub5_8a/entry-3195.html

Hardhany, Annisa.2017. *Militer dan Demokrasi di Thailand*. http://www.academia.edu/5298570/Militer_dan_Demokrasi_di_Thailand

Hirschmann .2018. Keadaan Politik di Thailand setelah Kudeta 2006 <http://p.dw.com/p/CJam>

Ingram, S. 2000Indonesia, Korea Selatan dan Malaysia. New York: Palgrave Macmillan., tanggal 21 Maret Thai Pemilihan Pemenang Lulus. Berita BBC. Dikutib dari <http://www.news.bbc.co.uk>

Madu,Ludiro.2018, *Gejolak Politik di Thailand*, Kedaulatan Rakyat Online, diakses dari <http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/2386/gejolak-politik-di-thailand.kr>

- Merdeka.2017. Biografi Thaksin Shinawarta.
<http://profil.merdeka.com/mancanegara/t/thaksin-shinawatra/>
- Paul, E. 2017. Hambatan untuk Demokratisasi di Asia Tenggara: Studi Negara Bangsa, Kawasan dan Global Order. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillian. Thai Interior Menteri Mengundurkan Diri. 2000, 29 Maret. Berita BBC <http://www.news.bbc.co.uk>
- Supervisor.2018 *Mahkamah Turunkan PM Thailand Yingluck Shinawatra*, diakses dari <http://www.antarajatim.com/lihat3/berita/132546/mahkamah-turunkan-pm-thailand-yingluck-shinawatra>
- Thailand History. 2017 <http://www.thaiembassy.at/index.php/about-thailand/thailands-history>
- Vivanews.2018. Kaos Merah ditantang Kaos Kuning. Diakses melalui http://dunia.news.viva.co.id/news/read/144946-di_thailand__kaos_merah_ditantang_kaos_kuning
- Youngyut, Aj.2017 An Overview of Politics and Government in Thailand.
<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAE&url=http%3A%2F%2Fhuman.ur.ac.th%2FThaiStudies%2FAjYoungyut.pdf&ei=1ktEVc-5NoqKuATBrIDoAw&usg=AFQjCNGn24WyVZgCMCD-4oHuLkbzu5E-Kg&sig2=rjc83Vr18cYloJiUQCmiQ>